

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang pesat, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan perkembangan tingkat permintaan yang kompleks mengakibatkan timbulnya berbagai macam industri yang hanya semata-mata menjawab kebutuhan masyarakat. Hal tersebut membuat persaingan dagang menjadi semakin ketat, terutama antar perusahaan sejenis. Persaingan terjadi karena konsumen dapat dengan mudah mengalihkan minat pemintaannya pada produk pesaing yang lebih kompetitif. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan berbagai macam barang dan jasa untuk mewujudkan cita cita bangsa Indonesia, yaitu kesejahteraan untuk rakyat.

BUMN mencakup berbagai sektor, seperti halnya sektor keuangan, sektor industri, sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor kehutanan, sektor transportasi dan lain sebagainya. Secara umum pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut para ahli adalah badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara. Berdasarkan Undang-Undang RI No.19 Tahun 2003 mengatakan bahwa pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara di pisahkan. Menurut Undang-Undang No.9 Tahun 1969, ada tiga macam bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan (perjan), perusahaan umum (perum), dan perusahaan perseroan (persero) (id.wikipedia.org).

Sejalan dengan adanya otonomi daerah maka timbul kosekuensi logis berupa tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan praktik keuangan yang sehat (*good governance*). Keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga anggaran perusahaan yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti yang di atur dalam undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah merupakan bagian dari kekayaan negara/daerah. Secara umum pendirian BUMN bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian daerah dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah(PAD), namun fakta menunjukan bahwa sebagian besar BUMD di Indonesia masih memiliki kinerja yang memprihatikan.

Pengelolaan anggaran yang baik merupakan prinsip *value for money* dan harus di jalani. Impelentasi prinsip *value for money* dapat memperbaiki kinerja sector publik. *Value for money* merupakan prinsip pengelolaan anggaran sector publik yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu ekonimimis, efektivitas dan efesiensi. *Value for money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya *input* paling kecil untuk mencapai *output* yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Mardiasmo, 2018).

Akuntabilitas sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja anggaran, Tanjung (2015) mengatakan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan

pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau untuk menerangkan kinerja dan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.

Transparansi juga sangat dibutuhkan dalam kinerja anggaran, transparansi adalah azas yang menentukan bahwa setiap orang setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai kedaulatan tertinggi. Menurut Mursyidi (2015) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur karena masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Agar pengelolaan anggaran berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan tentu pengawasan sangat dibutuhkan, Siagian (2015) mengatakan pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Meningkatkan kinerja anggaran kejelasan anggaran juga di perlukan, kejelasan anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Adanya kejelasan sasaran anggaran yang jelas akan dapat mempermudah individu untuk menyusun target-target anggaran yang akan disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi (Zein, 2016).

Perum Damri Palembang merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang jasa yang berada di Jl.Kol.H.Burlian Km9.Karya Baru Alang-Alang Lebar Palembang. Perum Damri Palembang melayani masyarakat di bidang transportasi umum khususnya dalam penyediaan AKDP (Angkutan Kota dan Provinsi), UABK (Unit Angkutan Bus Kota) dan bus bantuan pemerintah serta melayani transportasi bus lain sejenis yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan dan merupakan suatu unsur penting bagi perusahaan, karena semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Perum Damri sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perum Damri Palembang berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam hal penyediaan jasa angkutan. Semakin besarnya

persaingan khususnya dalam bidang jasa transportasi (angkutan penumpang) mengakibatkan perum Damri juga mendapat ancaman dalam kelangsungan operasinya. Adanya biaya-biaya yang bersifat yang harus dibayar baik ada maupun tidak ada operasi perusahaan serta kewajiban-kewajiban jangka pendek yang harus segera di lunasi terkadang menjadi masalah dikarenakan pendapatan yang kurang maksimal akibat dari pesatnya persaingan yang dihadapi. Anggaran sangat di butuhkan untuk menjalankan perusahaan seperti Damri untuk mengatasi biaya yang akan di keluarkan dalam melakukan kegiatan-kegiatan manajemen Damri harus menjalankan kinerja anggaran dengan baik. Dalam hal ini akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan kejelasan anggaran harus di jalankan dengan menggunakan konsep *value for money* untuk meningkatkan kinerja anggaran di Perum Damri Palembang.

Bedasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan kejelasan anggaran terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada perusahaan Perum Damri di Palembang. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Irna Setiyanningrum pada tahun 2016. Faktor yang membedakan dengan penelitian yang sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan di perusahaan Perum Damri di Palembang, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada BUMN di Yogyakarta dan juga variabel yang digunakan penelitian sebelumnya Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan sedangkan penelitian yang dilakukan

sekarang menggunakan variabel Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kejelasan Anggaran.

Bedasarkan penjelasan di atas maka penulis mengangkat judul **“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PENGAWASAN DAN KEJELASAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN DENGAN KONSEP *VALUE FOR MONEY* PADA PERUSAHAAN PERUM DAMRI KOTA PALEMBANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh pada Kinerja Anggaran dengan konsep *Value For Money* pada perusahaan Perum Damri Palembang?
2. Apakah Transparansi berpengaruh pada Kinerja Anggaran dengan konsep *Value For Money* pada perusahaan Perum Damri Palembang?
3. Apakah Pengawasan berpengaruh pada Kinerja Anggaran dengan konsep *Value For Money* pada perusahaan Perum Damri Palembang?
4. Apakah Kejelasan Anggaran berpengaruh pada Kinerja Anggaran dengan konsep *Value For Money* pada perusahaan Perum Damri Palembang?
5. Apakah Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kejelasan Anggaran berpengaruh pada Kinerja Anggaran dengan konsep *Value For Money* pada perusahaan Perum Damri Palembang?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperjelas dan mempermudah analisa pembahasan penelitian ini, maka dapat dilihat ruang lingkup dari penelitian yang akan dibahas mengenai bagaimana pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan kejelasan anggaran terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada perusahaan perum DAMRI Kota Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran dengan konsep *Value For Money* pada perusahaan Perum Damri Palembang.
2. Mengetahui pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran dengan konsep *Value For Money* pada perusahaan Perum Damri Palembang.
3. Mengetahui pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran dengan konsep *Value For Money* pada perusahaan Perum Damri Palembang.
4. Mengetahui pengaruh Kejelasan Anggaran terhadap Kinerja Anggaran dengan konsep *Value For Money* pada perusahaan Perum Damri Palembang.
5. Mengetahui pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kejelasan Anggaran terhadap Kinerja Anggaran pada perusahaan Perum Damri Palembang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang penganggaran terutama kegunaan Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kejelasan Anggaran pada Kinerja Anggaran dengan konsep *Value For Money*, serta juga dapat membantu masyarakat bahwa jika anggaran yang baik dapat membantu kinerja BUMN.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi pihak BUMN

Penelitian ini diharapkan bisa membantu BUMN dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kinerja anggaran, sehingga anggaran yang diharapkan dapat tepat sasaran dan serta dapat membantu BUMN untuk mencegah oknum-oknum yang sering melakukan kecurangan didalam BUMN.

b. Bagi pihak lain

Diharapkan dapat member informasi tentang kegunaan dari Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kejelasan Anggaran dalam pengelolaan anggaran perusahaan BUMN.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan secara ringkas isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematik penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang memaparkan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literature yang berkaitan dengan masalah penelitian, yang selanjutnya digunakan dalam landasan pembahasan dan pemecahan masalah, serta kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, oprasionalisasi variable, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian mengenai mengenai pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kejelasan Anggaran terhadap Kinerja Anggaran dengan konsep *Value For Money* dengan menguraikan hasil pengujian statistik.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya, saran untuk perbaikan di masa yang akan datang, dan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan.